

### BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

# KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/387/Kept./403.013/2021 TENTANG

## PENETAPAN NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MAGETAN

#### BUPATI MAGETAN,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (8) Peraturan Bupati Magetan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Magetan, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembagian Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat Kabupaten Magetan.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 1. Daerah-Daerah Pembentukan Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Tahun Nomor 244. Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk

- Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 tentang Tahun 2017 Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15
  Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
  Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran
  Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12,
  Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
  Nomor 64);
- 9. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 77).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KESATU : Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Inspektorat

Kabupaten Magetan dengan uraian sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari

2022.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI MAGETAN,

TTD SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya KERALA BAGIAN MUKUM SETDA JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si Rembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004 LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR: 188/387/Kept/403.013/2021

TANGGAL: 31 Desember 2021

### NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MAGETAN

- A. Sub Koordinator pada Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Bagian Perencanaan mempunyai tugas:
    - 1. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Sub Bagian Perencanaan;
    - 2. melaksanakan pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat;
    - melaksanakan pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
    - 4. melaksanakan pengkoordinasian dan penyusunan regulasi pengawasan serta peraturan perundang-undangan lainnya serta pengelolaan dokumentasi Hukum;
    - melaksanakan pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis,
       Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
       Inspektorat;
    - 6. melaksanakan penghimpunan, pengelolaan dan penyimpanan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Inspektorat dan Kabupaten;
    - 7. menyusun laporan dan Statistik Inspektorat;
    - 8. melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
    - 9. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sub bagian perencanaan; dan
    - 10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
  - b. Sub Koordinator Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas:
    - melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Analisis dan Evaluasi;
    - 2. melaksanakan penginventarisasian hasil pengawasan;
    - 3. melaksanakan pengkoordinasian evaluasi laporan hasil pengawasan;
    - 4. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;

- 5. melaksanakan pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- 6. melaksanakan pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat;
- 7. melaksanakan pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat;
- 8. melaksanakan penghimpunan, pengelolaan, penyusunan dan penyimpanan tindaklanjut pelaksanaan aksi pencegahan korupsi;
- 9. melaksanakan penghimpunan, pengelolaan, dan penyimpanan tindaklanjut pengawasan Reformasi Birokrasi; dan
- 10. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salihan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

AKA RISDIYANTO, S.H, M.S.

Pembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004